

**PERAN ETIKA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMERINTAH:
PERSPEKTIF KUALITATIF DALAM ADMINISTRASI NEGARA**

Oleh

BERKAT KASIH SIMBOLON

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung**



FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2023

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Etika politik, atau yang juga dikenal sebagai etika dalam politik, adalah praktik pemberian nilai terhadap tindakan politik dengan berlandaskan kepada prinsip etika dan moral. Etika politik membahas tentang pertimbangan moral dalam pengambilan keputusan politik, termasuk dalam hal penggunaan kekuasaan, pengaturan kebijakan publik, interaksi antaraktor politik, dan penerapan nilai-nilai moral yang berkaitan dengan politik.

Dalam konteks ini, etika politik mewajibkan agar kekuasaan negara dijalankan sesuai dengan norma-norma tertentu, seperti asas legalitas atau legalitas hukum dan pelaksanaan yang demokratis. Etika politik juga mencakup pertimbangan tentang tanggung jawab dan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat dan kepentingan publik (Dwijayanti, 2021). Prinsip etika politik juga dapat mencakup nilai-nilai seperti integritas, keadilan, transparansi, kejujuran, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat.

Adanya etika politik bertujuan untuk mengatur dan memberikan pedoman bagi para politisi dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses politik untuk bertindak secara moral dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kepentingan publik dan prinsip-prinsip etika (Febriany dkk., 2021). Etika politik juga menjadi landasan dalam menentukan tujuan dan kebijakan politik yang akan diterapkan, serta dalam menilai keberhasilan dan kegagalan tindakan politik.

Dalam dunia politik, etika politik dapat membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan membangun lingkungan politik yang lebih

baik dan lebih adil. Selain itu, mempertimbangkan etika politik juga dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dalam praktik politik.

Etika politik dan pengambilan keputusan pemerintah memiliki hubungan yang sangat erat. Etika politik memainkan peran penting dalam membimbing dan memengaruhi kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam berbagai tingkatan (Imanuel Tadanugi, 2013).

Etika politik, sebagai cabang etika yang fokus pada konteks politik, memberikan kerangka kerja moral bagi pengambilan keputusan pemerintah (Oleh dkk., 2017). Ini berarti bahwa dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah harus mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai etis yang relevan.

Pada tahap identifikasi masalah, etika politik membantu pemerintah dalam menentukan apakah masalah yang dihadapi memiliki aspek-etis yang harus diperhatikan. Misalnya, apakah masalah tersebut berkaitan dengan hak asasi manusia, keadilan sosial, atau nilai-nilai moral lainnya.

Selama proses pertimbangan berbagai opsi kebijakan, etika politik berperan dalam menghargai dan memeriksa dampak moral dari setiap pilihan yang tersedia. Hal ini membantu pemerintah dalam mengevaluasi apakah kebijakan yang dipilih sesuai dengan nilai-nilai moral yang dipegang (Funome dkk., 2012). Etika politik juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah sejalan dengan standar etis tertentu, seperti transparansi, akuntabilitas, dan integritas (Malchiel dkk., 2019).

Administrasi negara adalah bidang yang kompleks dan penting dalam konteks pemerintahan suatu negara. Ia merupakan kumpulan dari semua kegiatan dan proses yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan dengan efisien dan efektif, serta memastikan bahwa kebijakan dan program-program pemerintah dapat diimplementasikan dengan baik. Administrasi negara mencakup sejumlah elemen kunci yang berperan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan penyelenggaraan pemerintahan secara umum.

Salah satu peran utama dari administrasi negara adalah memfasilitasi hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Ini berarti administrasi negara harus mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan. Keterlibatan masyarakat sipil, pengawasan, dan partisipasi dalam proses-proses ini juga menjadi bagian integral dari administrasi negara yang baik.

Di dalam administrasi negara, terdapat berbagai tingkatan dan cabang yang berperan dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Dari tingkatan tertinggi, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif, masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawabnya sendiri dalam menjalankan negara. Di bawah tingkatan ini, ada birokrasi atau aparat pemerintahan yang mengelola berbagai departemen dan lembaga pemerintah. Tugas utama dari birokrasi adalah menerjemahkan kebijakan-kebijakan pemerintah menjadi tindakan konkret. Administrasi negara juga terkait erat dengan perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya negara. Ini termasuk pengelolaan anggaran publik, alokasi sumber daya, serta pembuatan dan implementasi program-program pembangunan. Administrasi negara harus menjalankan fungsi-fungsi ini dengan efisien agar sumber daya negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Dr. Hardi Warsono, 2019)

Selain itu, administrasi negara juga mencakup aspek hukum dan etika dalam pemerintahan. Hal ini melibatkan pematuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Pentingnya administrasi negara sangat besar, karena hal ini memengaruhi bagaimana negara berfungsi, bagaimana kebijakan publik dibuat dan dijalankan, serta bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakatnya. Sebuah administrasi negara yang efektif dan efisien dapat membantu mencapai tujuan-tujuan pembangunan, memberikan layanan publik yang baik, dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sebaliknya, ketidaksempurnaan dalam administrasi negara dapat mengakibatkan ketidakstabilan, ketidakpuasan masyarakat, dan masalah-masalah

lainnya dalam pemerintahan. Oleh karena itu, administrasi negara merupakan elemen kunci dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang esensial dalam sebuah negara.

Etika dalam konteks administrasi adalah aspek penting yang memengaruhi tata kelola pemerintah dan pelaksanaan kebijakan. Ini mencakup penerapan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai etis dalam pengelolaan pemerintahan dan tugas-tugas administratif (Funome dkk., 2012). Beberapa aspek penting dalam konteks administrasi ini seperti integritas dan kepatuhan hukum yang dimana integritas sendiri adalah nilai fundamental dalam administrasi, pelayanan publik yang berkualitas, akuntabilitas dan transparansi, penghindaran konflik kepentingan, perlindungan hak asasi manusia, pemberdayaan masyarakat, dan kepemimpinan yang etis.

Untuk mencari tahu lebih dalam mengenai peran etika dalam pengambilan keputusan, maka penulis memilih metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ilmu sosial untuk memahami fenomena manusia dan masyarakat dengan cara yang mendalam dan kontekstual. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman makna, interpretasi, dan kompleksitas aspek-aspek sosial dalam konteks di mana fenomena tersebut terjadi. Penelitian kualitatif mengakui bahwa realitas sosial bersifat subjektif dan kompleks, dan pendekatan ini bertujuan untuk menggali lapisan-lapisan makna yang lebih dalam di balik tindakan, sikap, dan interaksi manusia. Penelitian ini dirasa lebih efektif menggunakan metode kualitatif daripada kuantitatif karena sifatnya yang kompleks dan kontekstual. Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan sebuah teori. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Dr. Nursapia Harahap, 2020)

Dengan metode kualitatif, diharapkan pembahasan dapat mendalam dalam pemahaman konteks, selain itu pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendengarkan dan memahami pandangan subjektif dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan pemerintah. Proses pengambilan keputusan pemerintah seringkali rumit dan melibatkan berbagai faktor yang tidak dapat diukur secara langsung. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk melakukan wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi yang memungkinkan eksplorasi yang mendalam tentang proses ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan memahami peran etika dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah dalam konteks administrasi negara, seperti bagaimana peran etika memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dalam administrasi negara, dan bagaimana faktor-faktor kontekstual memengaruhi pertimbangan etis dalam proses tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana etika memengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah dalam administrasi negara?
- 2) Apa pandangan dan persepsi berbagai pemangku kepentingan terkait dengan peran etika dalam pengambilan keputusan pemerintah?
- 3) Bagaimana faktor-faktor kontekstual, seperti budaya, nilai-nilai sosial, dan norma, memengaruhi pertimbangan etis dalam pengambilan keputusan pemerintah?
- 4) Apakah terdapat konflik antara etika dan faktor-faktor lain yang memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, seperti kepentingan politik atau ekonomi?
- 5) Bagaimana peran pemangku kepentingan dan masyarakat sipil dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah untuk lebih etis?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

- 1) Untuk memahami peran dan dampak etika dalam pengambilan keputusan pemerintah di dalam administrasi negara.
- 2) Untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor kontekstual, seperti budaya, nilai-nilai sosial, dan norma, berinteraksi dengan pertimbangan etis dalam pengambilan keputusan pemerintah.
- 3) Untuk mengidentifikasi potensi konflik antara etika dan faktor-faktor lain yang memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, seperti kepentingan politik atau ekonomi.
- 4) Untuk mengeksplorasi peran pemangku kepentingan dan masyarakat sipil dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah untuk menjadi lebih etis.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat, yaitu:

- 1) Menyediakan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran etika dalam pengambilan keputusan pemerintah, yang dapat membantu meningkatkan kualitas dan integritas kebijakan pemerintah.
- 2) Membantu pemangku kepentingan dan masyarakat sipil dalam memahami dinamika pengambilan keputusan pemerintah dan cara mereka dapat berpartisipasi dalam proses tersebut.
- 3) Memberikan wawasan kepada peneliti, pengambil kebijakan, dan praktisi administrasi negara tentang kompleksitas dan tantangan yang terlibat dalam mengintegrasikan etika dalam pengambilan keputusan pemerintah.
- 4) Menyediakan dasar pengetahuan yang dapat digunakan sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang etika administrasi negara dan pengambilan keputusan pemerintah yang lebih etis.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Hardi Warsono, M. (2019). *Teori Administrasi*.
- Dr. Nursapia Harahap, M. A. (2020). *BUKU METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF DR. NURSAPIA HARAHAAP, M.HUM* (Dr. Hasan Sazali M.A, Ed.).
- Dwijayanti, A. (2021). The Fungsi Birokrasi sebagai Penasihat Kebijakan: Studi Fenomenologis pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 151–174. <https://doi.org/10.52316/jap.v17i1.68>
- Febriany, F. S., Dinie, D., & Dewi, A. (2021). NILAI-NILAI PANCASILA DAN DINAMIKA ETIKA POLITIK INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(4).
- Funome, P. I., Hardianto, W. T., & Setyawan, D. (2012). PERAN ETIKA POLITIK DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK. *JISIP*, 1(2), 9. www.publikasi.unitri.ac.id
- Imanuel Tadanugi. (2013). PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DI KANTOR CAMAT PAMONA SELATAN KABUPATEN POSO. *Jurnal Administratie*, 1, 7–14.
- Malchiel, D., Ramadhan, D., Agristya, D., & Mochammad, F. (2019). Analisis Penerapan Etika Pengambilan Keputusan Publik dalam Kebijakan Penertiban Kawasan Kalijodo Tahun 2016. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 7(2), 113–126. <https://doi.org/10.31629/juan.v7i2.1771>
- Oleh, D., Yuniningsih, D. T., Si, M., Program, P., Doktor, S., & Publik, A. (2017). *BUKU AJAR MATA KULIAH ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK*.